

# Fokus Dukungan Data dan Analitik Program SKALA<sup>1</sup>

Februari 2025



## Konteks

**Desentralisasi telah mengubah struktur tata kelola di Indonesia dengan memperkuat peran pemerintah daerah melalui pemberian otonomi yang lebih luas.** Desentralisasi di Indonesia dimulai secara masif pada akhir tahun 1990-an, menandai peralihan transformatif dari struktur tata kelola yang tersentralisasi menjadi struktur yang memberikan otonomi lebih besar sekaligus memberdayakan peran pemerintah daerah. Proses ini dilaksanakan melalui serangkaian regulasi, dimulai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang besar kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum. Selanjutnya Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan mengatur mekanisme penyediaan pembiayaan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki sumber daya keuangan yang memadai guna mengelola tanggung jawab baru mereka. Revisi terhadap Undang-Undang No. 22/1999 melalui Undang-Undang No. 32/2004 dan Undang-Undang No. 23/2014 semakin menyempurnakan upaya desentralisasi ini, yang kemudian diperkuat dengan pendekatan baru melalui Undang-Undang No. 1/2022 untuk mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan dan prioritas di daerah, proses desentralisasi diharapkan membawa manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan akuntabilitas daerah, tata kelola yang lebih responsif, dan kualitas penyediaan layanan publik yang lebih baik.

**Namun, proses tersebut menghadapi tantangan dalam pengelolaan data.** Fragmentasi sistem data di berbagai tingkat pemerintahan menjadi masalah utamanya. Banyak pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga yang mengembangkan sistem data independen sesuai dengan kebutuhan dan mandat khusus mereka.<sup>2</sup> Akibatnya, sistem data tersebut kurang terintegrasi dan terstandardisasi sehingga pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data menjadi tidak konsisten dan kurang efisien. Ketiadaan data terpilah yang akurat menghambat efektifitas program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Data terpilah—yang menguraikan informasi menjadi beberapa subkategori seperti jenis kelamin, status disabilitas, status sosial ekonomi atau lokasi—sangat penting dalam memenuhi kebutuhan khusus berbagai kelompok dalam populasi. Ketiadaan data ini dapat menyebabkan program pemerintah secara tidak sengaja mengabaikan tantangan spesifik yang dihadapi oleh kelompok tersebut, sehingga menghambat mereka untuk menerima perlindungan sosial, perawatan kesehatan, atau layanan pendidikan yang mereka butuhkan. Desentralisasi juga menyoroti perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan data. Proses desentralisasi mengungkapkan adanya

<sup>1</sup> Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global.

<sup>2</sup> Sebagai bagian dari proses desentralisasi, pemerintah daerah sekarang diamanatkan untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri untuk tujuan perencanaan, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan untuk pelaporan keuangan.

kesenjangan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dan menggunakan data untuk penyediaan layanan dasar yang inklusif. Meskipun beberapa wilayah telah mencapai kemajuan signifikan, wilayah lainnya masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dasar karena keterbatasan sumber daya dan keahlian teknis. Ketidakmerataan kapasitas ini menghambat upaya untuk mengatasi ketimpangan regional dan memastikan penyediaan layanan dasar yang merata di seluruh wilayah.

**Indonesia sedang melakukan upaya bersama untuk menstandarisasi dan mengintegrasikan sistem datanya guna meningkatkan penyediaan layanan dasar.** Selama dua dekade terakhir, tata kelola pengumpulan dan pemanfaatan data di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Seiring waktu, pemerintah mendorong integrasi data dan interoperabilitas antar kementerian/lembaga serta tingkat pemerintahan, sambil memperkuat tata kelola data daerah. Kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan data di seluruh tingkat pemerintahan. Selain itu, Peraturan Presiden No. 95/2018 mengatur pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mengonsolidasikan lebih dari 24.000 aplikasi pemerintah, guna meningkatkan efisiensi dan memastikan akses nasional terhadap layanan digital. Namun, inisiatif ini menghadapi tantangan, terutama dalam mengakomodasi konteks bahwa lebih dari 500 pemerintah daerah yang beragam di seluruh Indonesia.

## Dukungan Program SKALA terhadap Data dan Analitik untuk Layanan Dasar yang Inklusif

**Program SKALA berupaya memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk meningkatkan tata kelola di daerah tertinggal di Indonesia,** serta dalam menyediakan layanan dasar yang inklusif dan merata di provinsi wilayah implementasi program.<sup>3</sup> Program ini mengedepankan pentingnya data yang andal/akurat untuk mendukung tata kelola yang efektif, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan tata kelola data melalui pendekatan komprehensif untuk memperkuat kerangka Data dan Analitik. Hal ini mencakup dukungan untuk meningkatkan siklus data daerah, yang memerlukan perbaikan kebijakan dan regulasi.

Berbagai tantangan dalam peningkatan tata kelola data, seperti peraturan, standar/kualitas, protokol, kepatuhan dan keamanan data, menjadi faktor yang menghambat integrasi data secara efektif. Pengembangan sistem data oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara terpisah menciptakan hambatan untuk kerja sama dan berbagi data. Keterpisahan kelembagaan ini mempersulit upaya penyelarasan antar sektor pemerintahan yang berbeda. Untuk mengatasinya, Program SKALA bekerja sama secara erat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan data dan mendorong interoperabilitas.

Selain upaya koordinasi di tingkat pusat, Program SKALA juga berfokus untuk memastikan bahwa peningkatan pengelolaan data diteruskan ke pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab dalam penyediaan layanan dasar. Program SKALA membantu mengembangkan kerangka kerja dan sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan sistem data mereka dengan platform di tingkat pusat, sehingga data dikumpulkan, dikelola, dan dianalisis dengan cara yang terstandarisasi di semua tingkat pemerintahan.

**Strategi Dukungan Data dan Analitik Program SKALA diimplementasikan melalui empat Rencana Aksi Tematik (TAP).** Dalam upaya mengatasi tantangan sistemik dalam memperkuat tata kelola data, Program SKALA telah mengembangkan Rencana Aksi Tematik (TAP). Setiap TAP dikembangkan untuk memberikan jalur keluaran yang perlu dicapai guna mendorong kemajuan. Keterkaitan antara berbagai upaya ini perlu dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah.



### Satu Data Daerah

Memperkuat siklus data yang berfungsi di provinsi wilayah implementasi Program SKALA, sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.



### Sistem Informasi Tingkat Desa

Memastikan sistem di tingkat desa mengintegrasikan variabel dari basis data nasional untuk meningkatkan akurasi dan kualitas analisis.

<sup>3</sup> Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.



### **Pengelolaan dan Sistem Data terintegrasi**

Mengimplementasikan dan mengintegrasikan sistem pengelolaan data di tingkat pusat dan daerah serta memastikan penggunaannya dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah.



### **Analisis dan Pemanfaatan Data**

Mendukung pemerintah daerah untuk secara berkala menganalisis dan menggunakan data sebagai masukan dalam perencanaan kegiatan pembangunan.

#### **Satu Data Daerah:**

**Program SKALA mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia melalui integrasi tata kelola data di semua tingkat pemerintahan.** Inisiatif Satu Data memiliki peran penting di tingkat daerah, di mana di mana ketidakjelasan peran dan tanggung jawab sering kali menghambat pengelolaan data secara kohesif. Untuk mengatasi tantangan ini, Program SKALA berkolaborasi dengan mitra di tingkat pusat dan provinsi untuk (i) mendukung pengelolaan dan penyelarasan sistem Satu Data Daerah dengan sistem di tingkat pusat, (ii) menstandarisasi siklus data, (iii) mendukung pengembangan kebijakan dan implementasi Forum Satu Data Daerah, dan (iv) mengembangkan kapasitas dalam pengelolaan data. Sejak awal, Program SKALA juga telah berkontribusi terhadap penyusunan dan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/2024, yang mengatur mekanisme formal untuk akuntabilitas, berbagi data, dan penyelarasan lintas kementerian/lembaga pemerintah pusat dan daerah.

#### **Sistem Informasi di Tingkat Desa:**

**Program SKALA memperkuat sistem ini untuk memastikan kelompok rentan terwakili secara akurat.** Program SKALA mendukung pemerintah pusat untuk mengoordinasikan dan mengawasi integrasi variabel data sosial ekonomi nasional ke dalam sistem informasi di tingkat desa, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menetapkan kerangka, mengembangkan kapasitas, dan merencanakan perluasan sistem ini. Selain itu, Program SKALA juga memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas setempat, dan jaringan masyarakat sipil untuk memperkuat dan memperluas sistem informasi di tingkat desa. Sejak November 2022, Program SKALA telah mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, dan Papua dalam memperluas cakupan sistem informasi desa serta menyelaraskan protokol pengumpulan data dengan standar dan sistem nasional.

#### **Sistem Pengelolaan dan Integrasi Data:**

**Program SKALA mendukung integrasi sistem data pemerintah untuk mendorong efisiensi.** Program SKALA berkolaborasi dengan mitra kementerian/lembaga untuk mengidentifikasi peluang integrasi SIPD Kemendagri, SEPAKAT Bappenas<sup>4</sup>, dan SIKD Kemenkeu, menetapkan proses bisnis interoperabilitas, serta melakukan uji coba sistem. Selain itu, Program SKALA juga berupaya meningkatkan kapasitas penggunaan SIPD dalam mendukung perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk melalui integrasi sistem data pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem data agar dapat memungkinkan arus informasi yang lebih baik antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Di Provinsi NTB dan Aceh, integrasi ini telah menghasilkan peningkatan proses perencanaan, kepatuhan data, dan peningkatan penyediaan layanan yang lebih baik.

#### **Analisis dan Pemanfaatan Data:**

**Program SKALA memprioritaskan pemanfaatan data secara efektif dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menganalisis dan menggunakan data untuk mendukung perencanaan yang lebih baik.** Program SKALA juga mendukung peningkatan kapasitas Pelatih Utama untuk membantu pejabat pemerintah daerah dalam menggunakan sistem analisis kemiskinan, seperti SEPAKAT. Pelatihan ini bertujuan untuk memungkinkan mereka bekerja menggunakan data makro dan mikro, termasuk data sosial ekonomi nasional, guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan setempat. Hingga saat ini, Program SKALA telah melatih lebih dari 500 perangkat pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kepatuhan kualitas data di beberapa provinsi, seperti Maluku dan Gorontalo.

<sup>4</sup>Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu.

Melalui TAP terkait data dan analitik, Program SKALA berupaya untuk mengatasi tantangan kelembagaan dan tata kelola dalam pengelolaan data secara efektif. Upaya ini meliputi pengembangan kerangka regulasi yang terkoordinasi dan berjenjang, sehingga kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat bekerja secara selaras. Program SKALA juga mendorong pembentukan forum dan mekanisme kelembagaan, seperti Forum Satu Data, yang mengawasi implementasi kebijakan data di berbagai tingkat pemerintahan. Dukungan diberikan melalui beberapa modalitas, yaitu: (i) pengembangan sistem, analisis dan pemanfaatan data; (ii) pengembangan kapasitas atau keterampilan; (iii) pengembangan kebijakan dan pedoman; (iv) dukungan perencanaan dan implementasi; serta (v) fasilitasi sinergi/kolaborasi dan advokasi antarkementerian/lembaga.

## Rencana ke Depan

### Satu Data Daerah:



Dukungan teknis dan masukan dari Program SKALA telah berkontribusi pada penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Saat ini, Program SKALA mendukung kementerian dan pemerintah daerah mitra program untuk menetapkan struktur organisasi, peran, tanggung jawab, dan proses untuk memastikan implementasi peraturan baru ini berjalan secara efektif. Dukungan tersebut mencakup pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan siklus data.

### Sistem Informasi Tingkat Desa:



Program SKALA akan terus mendukung penyusunan analisis dan memfasilitasi dialog antara pemerintah pusat dan daerah terkait kebutuhan kebijakan nasional untuk menyelaraskan input data desa ke dalam sistem di tingkat nasional dan daerah.

### Pengelolaan dan Sistem Data terintegrasi:



Setelah kesepakatan mengenai proses bisnis untuk interkoneksi sistem tercapai, Program SKALA mendukung Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas dalam mengintegrasikan sistem data mereka. Dukungan ini mencakup menyediakan data dan analitik yang diperlukan oleh semua pihak yang terlibat. Program SKALA juga mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem data mereka, seperti portal data, melalui pemetaan data, analisis, dan dengan memastikan interkoneksi dengan sistem pusat.

### Analisis dan Pemanfaatan Data:



Program SKALA mendukung pemerintah daerah dalam memperluas cakupan data terpilah mereka untuk meningkatkan analisis terkait kebutuhan kelompok rentan. Program ini juga sedang mempersiapkan dukungan untuk pemanfaatan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di tingkat daerah. Selain itu, Program SKALA juga mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem analisis serta kapasitas dan keterampilan mereka. Dukungan ini berfokus pada penilaian sejauh mana standar pelayanan minimal dapat terpenuhi dan inklusif.



**SKALA**  
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

### KONTAK KAMI



IFC Tower 2, Level 17  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23  
Jakarta 12920



[communications@skala.or.id](mailto:communications@skala.or.id)



[SKALA.or.id](http://SKALA.or.id)